

Mekanisme Mempertahankan Teritori dalam suatu Wilayah

Mechanism of Defending Territories in an Area

Parmonangan Manurung^{1,2}, Ikaputra²

Diterima: 26 Februari 2020

Disetujui: 10 Juli 2020

Abstrak: Teritorialitas merupakan terminologi yang awalnya digunakan untuk menggambarkan wilayah kekuasaan pada hewan, terutama burung. Pada perkembangannya, terminologi ini juga digunakan untuk mendefinisikan wilayah yang dimiliki manusia, baik individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan proses dan mekanisme terbentuknya teritori dalam suatu wilayah, serta sistem pertahanan yang digunakan, baik dalam skala meso, maupun makro. Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dengan obyek penelitian berupa berbagai teks terkait "teritorialitas" dan subyek penelitian berupa buku dan artikel terpublikasi dalam jurnal telah digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu proses sebuah area menjadi wilayah teritori, yaitu memiliki sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan, proses kepemilikan atau penguasaan wilayah, serta proses mempertahankan wilayah tersebut dengan menggunakan sistem pertahanan tertentu. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa wilayah teritori dimiliki dan dipertahankan untuk mengamankan sumber daya, dan upaya mempertahankan wilayah teritori dilakukan dengan satu atau beberapa sistem pertahanan.

Keyword: teritori, sumber daya, kebutuhan, kepemilikan wilayah, sistem pertahanan

Abstract: Territoriality is a term that was initially used to describe the realm of power in animals, especially birds. In its development, this terminology is also used to define areas owned by humans, both individuals, and groups. This study aims to find the process and mechanism of forming territory in an area, as well as the defense system used, both on a micro and macro scale. The study was conducted using a content analysis method with the object of research being various texts related to "territoriality" and research subjects in the form of books and articles published in journals. The results showed that there is a process of an area become a territory, which has the resources to meet the needs, the process of ownership or control of the area, as well as the process of maintaining an area using a particular defense system. From the results of the discussion, it can be concluded that the territory is owned and managed to secure resources, and efforts to maintain the territory are carried out with one or several defense systems.

Keyword: territory, resources, needs, ownership of an area, defense system.

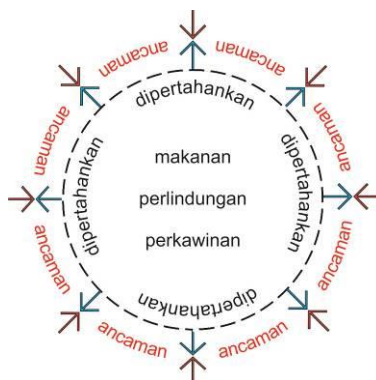
PENDAHULUAN

Berdasarkan Oxford Learner Dictionaries (www.oxfordlearnerdictionaries.com), *territory* merupakan suatu area atau wilayah yang dimiliki manusia, kelompok, dan lainnya

¹ Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana

² Program Doktor Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada

yang akan dipertahankan bila ada pihak lain yang mencoba memasukinya. Sementara Menurut Stamps (2011: 761) istilah “teritori” telah didefinisikan oleh Noble selama lebih dari lima puluh tahun sebagai “area pertahanan.” Sedangkan (Brower (1980: 179-180; Grahame (2001: 275); dan Osborne (1992: 13) berpendapat bahwa istilah ‘teritorialitas’ lebih dulu digunakan dalam perilaku spasial beberapa hewan seperti burung kemudian ikan, binatang pengerat, rusa dan kemudian kera, untuk menentukan wilayah kekuasaan, mempertahankan makanan, perlindungan dan perkawinan. Sedangkan pada manusia penggunaan ‘territorial’ sangat bervariasi tetapi tidak konsisten dan berbeda-beda. Yeganeh & Kamalizadeh (2018: 589) berpendapat bahwa secara konseptual, ‘teritorial’ merupakan sebuah ruang personal dan privasi serta perilaku yang menentukan teritorialitas. Teori tentang awal kata ‘teritori’ berdasarkan pendapat para peneliti tersebut dapat disimpulkan dalam Gambar 1 yang menunjukkan adanya suatu area yang dimiliki dan dipertahankan untuk melindungi aset (makanan dan tempat perlindungan) serta aktivitas personal (perkawinan).



Sumber: Diolah berdasarkan Nobel (dalam Stamps, 2011: 761); Brower (1980: 179-180); Grahame (2001: 275); dan Osborne (1992: 13)

Gambar 1. Skema Teritori Secara Umum

Dengan demikian, kata ‘teritori’ dapat disimpulkan sebagai wilayah yang dimiliki, dikuasai dan tidak boleh dimasuki pihak lain yang tidak berkepentingan, dan akan dipertahankan dari gangguan atau ancaman pihak lain. Menurut Grahame (2001: 275); Brower (1980: 180); dan Aiello & Thompson (1980: 113-114) ‘teritori’ berbeda dengan ‘ruang pribadi’ (*personal space*) karena ‘teritori’ lebih konkret dan mengacu pada wilayah geografi. Ruang pribadi mengacu pada jarak yang tercipta antara satu orang dengan orang lain dan tergantung pada budaya serta hubungan kedekatan antar masing-masing individu. Ruang pribadi digambarkan sebagai gelembung yang mengelilingi seseorang dan akan mengikuti ke mana pun orang tersebut pergi. Walau pun terdapat perbedaan antara ‘teritori’ dengan ‘ruang personal’, namun Hutchison (2008: 235) mengatakan keduanya sama-sama bertujuan untuk mengamankan wilayah privasi.

Dengan memahami makna “teritori” maka menarik untuk menggali prinsip-prinsip dan konsep serta aplikasinya dalam wilayah suatu lingkungan binaan (*built environment*). Penerapan prinsip-prinsip dan konsep teritorialitas dalam lingkungan binaan akan menghasilkan desain yang bervariasi karena mekanisme dan sistem pertahanan yang diterapkan akan memengaruhi proses maupun produk suatu perencanaan dan perancangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan proses atau mekanisme terciptanya teritori dalam suatu wilayah serta mekanisme dan sistem yang digunakan dalam mempertahankan teritori wilayah tersebut. Pertanyaan penelitian yang disusun

dengan mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian adalah: bagaimana mekanisme mempertahankan teritori dalam suatu wilayah?

METODE

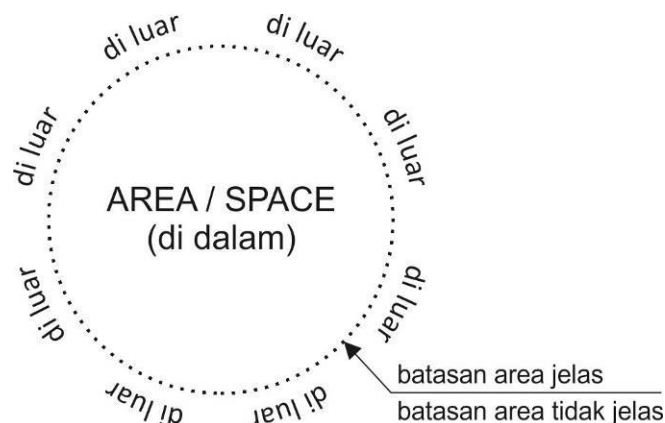
Penelitian telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi (*content analysis*) deskriptif. Sebagaimana Schreier (2012: 1), analisis isi kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis makna dari material kualitatif. Menurut Krippendorff (2004: xiii), dari berbagai metode, analisis isi merupakan suatu metode riset paling penting dalam ilmu sosial. Data yang menjadi obyek penelitian bukan berupa aktivitas fisik melainkan berupa teks, gambar, atau ekspresi, data kemudian dilihat dan dibaca, serta diinterpretasikan dan dipahami maknanya.

Analisis deskriptif dan interpretatif dilakukan terhadap teks dengan obyek "teritorialitas" untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subyek penelitian berupa buku dan artikel terpublikasi dalam jurnal, berbagai subyek penelitian yang memuat teks terkait obyek penelitian dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan tiga topik pokok yaitu: teritori; menguasai area/wilayah teritori; dan mempertahankan teritori area/wilayah. Hasil kajian terhadap berbagai subyek penelitian tersebut kemudian dibandingkan satu dengan lain, dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan kesimpulan.

Teritori Sebagai Sebuah Wilayah

Dalam konteks urban, Aguilar (2008: 133-136) menggambarkan *urban periphery* sebagai sebuah area yang mengelilingi dan melingkupi kota adalah teritori. Area ini hampir lima puluh persen biasanya merupakan hutan dan sebagian lainnya area pertanian, padang rumput dan pemanfaatan lahan. Aguilar mengungkapkan area teritori mengalami perubahan dan pergeseran ke arah heterogen sebagai dampak perbedaan sosial ekonomi. Pendapat Aguilar dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dipertahankan sebagai teritori dapat merupakan ruang fisik yang areanya dibatasi oleh berbagai peruntukan lahan, dan area yang menjadi teritori sebuah kota dapat berubah akibat faktor sosial dan ekonomi. Berbeda dengan Aguilar, Yeganeh & Kamalizadeh (2018: 588) mengatakan bahwa 'teritorialitas' merupakan dimensi sosial ruang perkotaan. Ini menunjukkan bahwa area/area sebagai sesuatu yang dimiliki dan dipertahankan, bukan hanya terkait wilayah geografi maupun wilayah fisik, tetapi juga mencakup wilayah sosial yang bersifat abstrak.

Space menurut Aristoteles merupakan 'wadah sesuatu' (Meis, 2002: 101), Meis lebih jauh menjabarkan bahwa *space* dibatasi secara eksternal dan diisi secara internal, sehingga tidak ada sebuah ruang (*space*) yang kosong, karena semuanya memiliki posisi, lokasi, dan tempat. Sementara itu, ruang hadir sebagai hasil hubungan dari obyek atau batasan dengan bidang. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa 'ruang' (*space*) merupakan sebuah area yang terbentuk karena adanya batasan yang melingkupinya (luar dan dalam) dan berfungsi untuk mewadahi sesuatu. 'Ruang' (*space*) menurut Ching (2007: ix) bersama bentuk (*form*) merupakan sebuah media untuk menyelesaikan permasalahan fungsi dan konteks. Ruang dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kebutuhan dan konteksnya, hal ini menunjukkan kehadiran ruang adalah untuk melayani fungsi dan merespon lingkungan kontekstualnya. Lebih lanjut Ching (2007: 29) mengatakan bahwa *space* juga dapat dibentuk oleh dinding, lantai dan langit-langit, bagian *space* ini disebut sebagai volume. Jelas bahwa *space* atau area tercipta melalui batasan atau pelingkup yang jelas, baik secara vertical maupun horizontal (Gambar 2). Dalam konteks permukiman, kawasan atau ruang kota, *space* dapat terbentuk oleh bangunan-bangunan yang membentuk pelingkup, sehingga tercipta ruang di antaranya seperti jalan, taman, dan ruang luar lainnya.

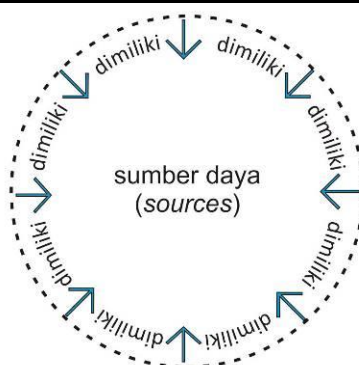


Sumber: Diolah berdasarkan Oxford Learner's Dictionaries; Aguilar (2008); Yeganeh & Kamalizadeh (2018); dan Meis (2002)

Gambar 2. Area Sebagai Sebuah Ruang Atau Wilayah

Teritori Sebagai Wilayah Yang Dimiliki

Menurut Brower (1980: 185), upaya yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam memiliki atau menguasai area/wilayah dapat dikategorikan sebagai sebuah klaim teritorial, dan klaim teritorial kemudian disebut sebagai 'kepemilikan' yang diikuti dengan tanda-tanda tertentu untuk menunjukkan kepemilikan tersebut seperti pagar, pintu, kotak bunga, maupun papan nama. Lebih lanjut Brower menyebutkan empat jenis kepemilikan yaitu milik pribadi, milik komunitas (teritori dikontrol kelompok yang anggotanya dapat berubah), milik masyarakat (fasilitas publik), dan kepemilikan bebas (tidak memiliki pemilik permanen). Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu wilayah dapat dimiliki dalam empat tipe kepemilikan berdasarkan status kepemilikannya, namun mengapa suatu wilayah dimiliki atau dikuasai? Apa yang membuat suatu individu, komunitas, maupun kelompok masyarakat ingin memiliki suatu wilayah?



Sumber: Diolah berdasarkan Brower (1980)

Gambar 3. Skema Kepemilikan Suatu Wilayah

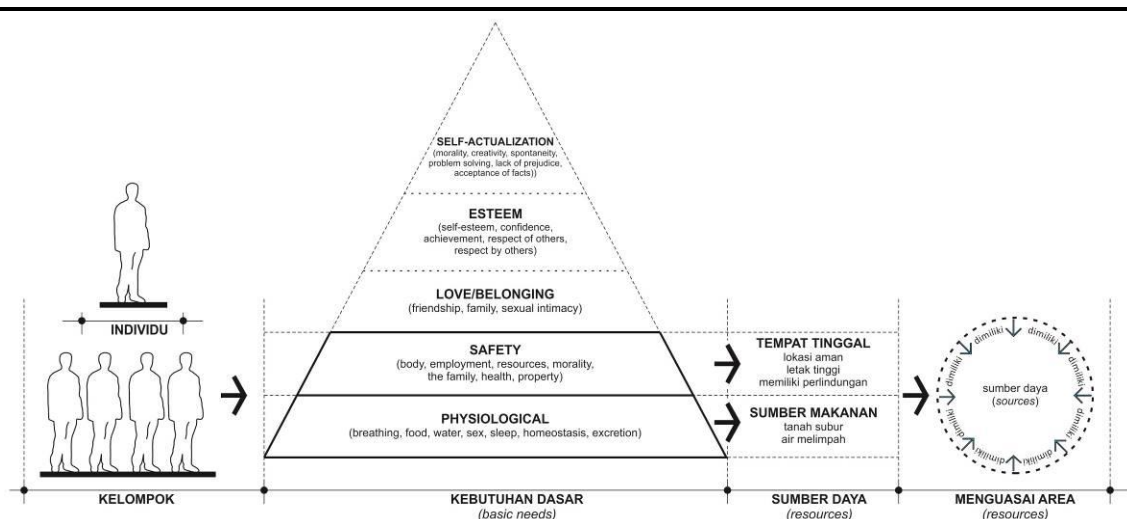
Mekanisme Kepemilikan sebuah Wilayah

Populasi manusia yang meningkat dan keterbatasan sumber daya menyebabkan terjadinya persaingan kepemilikan dalam berbagai hal, persaingan ini mengakibatkan terjadinya berbagai konflik. Dalam kepemilikan sesuatu (*ownership*), terjadi sebuah proses

atau tindakan yang membuat sesuatu menjadi milik seseorang atau kelompok, proses ini disebut sebagai *'appropriation'*. Proses kepemilikan ini dapat berwujud sebagai sebuah pertukaran, maupun warisan (Strang & Busse, 2011: 1&4). Strang dan Busse menyebutkan sumber daya menyebabkan individu maupun kelompok ingin memiliki sesuatu, dan keterbatasan sumber daya juga menimbulkan terjadinya persaingan. Pengembaraan yang dilakukan sekelompok orang atau suku tertentu adalah sebuah upaya mencari sumber daya makanan dan menjamin pasokan makanan (Aiello & Thompson, 1980: 108). Dapat disimpulkan bahwa sumber daya juga menjadi suatu pertimbangan suatu kelompok dalam memiliki suatu area.

Selain sumber daya, upaya memiliki sebuah area/wilayah tentu memiliki suatu dasar dan pertimbangan lain, hal ini juga menjadi dasar pertimbangan masyarakat nusantara masa lalu. Menurut Kis-Jovak et al. (1988: 20-23), faktor keamanan menjadi kebutuhan suku Toraja dalam memilih lokasi permukiman, pertimbangan keamanan menjadi dasar suku Toraja memilih puncak bukit maupun tebing sebagai lokasi permukiman mereka, serta menciptakan akses yang sulit dijangkau, baik dengan tangga maupun terowongan. Kebutuhan keamanan turut mendasari layout rumah disusun berjejer dengan jarak yang rapat. Keamanan juga menjadi kebutuhan suku Batak Toba dalam membangun kampung atau permukiman, sebagaimana Setiawan (2010: 152-153) yang mengatakan bahwa permukiman tradisional suku Batak (*huta*) dibangun dengan dikelilingi benteng yang terbuat dari bebatuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat tradisional membangun permukiman mereka untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu (Oliver, 2006: xxi).

Manusia membangun lingkungan binaan termasuk desa dan kota dalam upaya merespon alam, dan beradaptasi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan mereka (Aiello & Thompson, 1980: 108). Menurut Maslow (2016: 6-10), kebutuhan (*needs*) merupakan landasan yang memotivasi manusia dalam melakukan sesuatu, manusia memiliki dua jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar, dan di antara berbagai kebutuhan fisiologi yang paling utama adalah kebutuhan terhadap makanan, sedangkan kebutuhan psikologis paling pokok adalah keamanan. Gambar 4 memperlihatkan piramida hierarki kebutuhan menurut Maslow yang dimulai dari kebutuhan mendasar berupa kebutuhan fisiologis seperti bernafas, makan minum, dan sebagainya. Kebutuhan manusia menjadi dasar manusia mencari sumber daya dan kemudian menguasainya.



Sumber: Diolah berdasarkan Strang & Busse (2011); Aiello & Thompson (1980); dan Maslow (2016).

Gambar 4. Proses Memiliki Suatu Area

Menurut Steverink (2014), kebutuhan merupakan suatu hal yang spesifik untuk dipenuhi, kebutuhan terdiri dari dua komponen yaitu, kebutuhan fisik, dan sosial. Keduanya dicapai dalam upaya menuju kesejahteraan. Sedangkan kebutuhan fisik dicapai untuk memenuhi kesejahteraan fisik. Terdapat tiga lapisan dan mencapai kesejahteraan yaitu, kebutuhan (sebagai lapisan teratas), kemudian diikuti oleh tujuan (*goals*) dan sumber daya (*resources*) sebagai lapisan di bawahnya. Kebutuhan bersifat permanen, universal dan relevan untuk segala usia. Sedangkan 'tujuan' dan 'sumber daya' merupakan metode dan instrumen yang digunakan untuk mencapai kebutuhan.

Berdasarkan berbagai referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan terhadap sumber makanan, minuman, serta kebutuhan fisiologis lainnya, serta kebutuhan psikologis yang mencakup keamanan (tempat tinggal, kesehatan, sumber daya, dll.) merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan dasar manusia. Manusia kemudian mencari dan berupaya memiliki sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Gambar 4), setelah memiliki dan menguasai wilayah yang memiliki sumber daya, manusia kemudian berupaya mempertahankannya dengan menggunakan mekanisme tertentu.

Kepemilikan suatu sumber daya maupun sesuatu memiliki beberapa bentuk, dapat berupa kepemilikan pribadi, kelompok, masyarakat maupun perusahaan. Selain itu, hak penggunaannya juga memiliki beberapa varian, milik pribadi atau umum (Tisdell, 2005: 132-133). Untuk memiliki sebuah aset, termasuk sebuah area, menurut Hutt et al. (2004: 168) terdapat beberapa cara yaitu melalui pembelian, konsinyasi, pemberian, warisan, pertukaran, serta metode kepemilikan maupun balik nama lainnya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa proses mendapatkan sebuah area menjadi hak milik dapat dilakukan dalam berbagai hal, proses ini yang disebut Strang & Busse (2011: 1&4) sebagai *appropriation*, namun untuk menjadi hak milik (*ownership*) harus dilakukan proses legal yaitu balik nama. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme memiliki sebuah area diawali dengan adanya kebutuhan (*needs*) dan upaya mendapatkan sumber daya (*resources*), sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Keinginan memiliki area ini kemudian membutuhkan proses kepemilikan (*appropriation*) dalam berbagai cara, dan pada akhirnya kepemilikan (*ownership*) terhadap sebuah area memiliki keabsahan melalui proses balik nama.

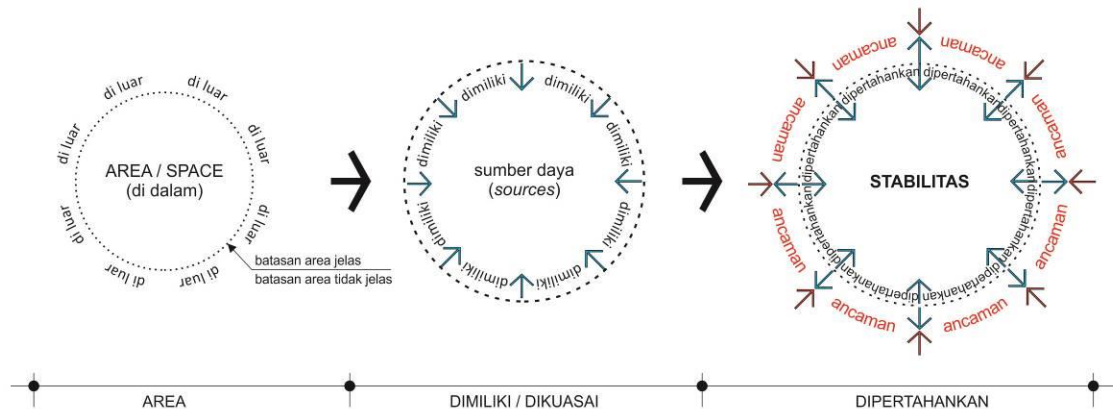
Teritori Sebagai Wilayah Yang Dipertahankan

Dengan memahami makna 'area', maka pengertian 'teritori' menjadi lebih mudah untuk dijabarkan. Hal penting lain untuk mengurai pemahaman ini adalah dengan menggali kata 'pertahanan', kenapa teritori harus dipertahankan? Dari apa teritori harus dipertahankan?. Mengacu Jurmain, et al. (2006: 152), sebagai bagian dari individu maupun kelompok, teritori harus dipertahankan dari intrusi (*intrusion*). Kata intrusi/ *intrusion* dalam Oxford Learner's Dictionaries (www.oxfordlearnerdictionaries.com) memiliki makna yang sangat dalam, yaitu segala sesuatu yang tidak diinginkan karena dapat memengaruhi suasana atau kehidupan manusia. Pengertian lain dalam kamus ini adalah, suatu tindakan yang memasuki area pribadi atau area lain yang tidak diinginkan. Gambar 5 menunjukkan skema terjadinya upaya mempertahankan suatu area/wilayah yang dimiliki untuk suatu tujuan tertentu.

Teritorialitas mengacu pada perilaku dan kondisi psikologis seseorang atau kelompok orang yang terkait dengan kepemilikan ruang fisik atau area (Wortley & McFarlane, 2011: 149). Bila dikaitkan dengan pemahaman sebelumnya, maka perilaku dan psikologi merupakan dasar suatu kelompok dalam mempertahankan kepemilikan suatu area dari ancaman pihak lain. Perilaku ini sangat terkait faktor psikologis sebagai upaya mempertahankan sumber daya atau kebutuhan yang telah dimiliki agar tidak diganggu atau dirusak pihak lain.

Mengapa suatu wilayah harus dipertahankan? Menurut Jurmain, et al. (2006: 152), semua wilayah yang dipertahankan disebut sebagai teritori. Pada primata dikenal satu area inti (*core area*) yang merupakan sumber makanan dan minuman, wilayah ini harus

dipertahankan, dan karena sifatnya harus dipertahankan, maka wilayah inti disebut sebagai teritori (area yang dipertahankan). Dapat ditarik benang merah bahwa, seluruh wilayah yang dipertahankan dapat disebut sebagai 'teritori', dan wilayah tersebut dipertahankan karena di dalamnya terdapat sumber daya penting bagi komunitas yaitu makanan dan minuman. Vacaro, et al. (2014: 3) mengatakan bahwa teritorial tidak semata tentang penggunaan kekuatan, tetapi juga mengacu pada makna, klaim, konsolidasi, legitimasi, organisasi, institusi, praktik produktif, dan demografi.



Sumber: Diolah berdasarkan www.oxfordlearnerdictionaries.com; dan Jurmain, et al. (2006)

Gambar 5. Proses Terciptanya Teritori

Tujuan mempertahankan teritori adalah untuk menjaga stabilitas, agar tidak terjadi perubahan pada tatanan yang sudah ada, tatanan ini dapat berupa stabilitas kebutuhan maupun sumber daya. Menurut Sack (1986: 5), teritorialitas merupakan strategi geografis untuk mengontrol manusia atau makhluk lain dengan cara mengontrol suatu wilayah. wilayah dalam hal ini memiliki berbagai tingkatan dan konteks sosial berbeda. Secara sederhana, Sack (1986: 19-20) mendefinisikan 'teritori' sebagai 'the control of area', suatu upaya yang dilakukan untuk mengontrol sebuah area/wilayah, dan melibatkan individu maupun suatu kelompok untuk memengaruhi tindakan manusia atau makhluk lain. Teritorialitas juga menjadi strategi untuk membatasi akses manusia dan makhluk lain dalam berbagai tingkatan. Namun teritori pada manusia sangat bervariasi, tidak konsisten, serta sulit untuk diprediksi. Hal ini sangat terkait dengan perbedaan budaya yang memengaruhi perilaku manusia. Kondisi ini yang menyebabkan teritori suatu wilayah dapat berubah dan dapat diakses oleh pihak lain, sebagaimana (Said & Alfiah, 2017; dan Putri et al., 2012: 65) yang mengatakan bahwa kebutuhan ruang dapat menyebabkan terjadinya perubahan teritori. Berdasarkan dua penelitian tersebut didapatkan bahwa batasan teritorial dapat berubah atau diubah untuk memenuhi kebutuhan ruang publik maupun semi publik.

Mekanisme Mempertahankan Teritori

Untuk mengontrol wilayah yang dimiliki agar tidak dimasuki pihak lain, menurut Hantono & Pramitasari (2018: 89) dapat menggunakan teks, simbol, maupun elemen pembatas sehingga batasan atau wilayah yang merupakan area teritorial dapat teridentifikasi secara jelas. Ketika teritori suatu wilayah mengalami ancaman atau potensi ancaman maka akan terjadi peningkatan perilaku defensif. Perilaku ini dapat berupa meningkatnya pengawasan, diperjelasnya batasan teritori wilayah, pemasangan penghalang, diperketatnya aturan, maupun dipertegasnya elemen-elemen penanda teritori

wilayah (Brower, 1980: 190). Upaya mempertahankan teritori juga dapat dilakukan dengan menggunakan elemen alam (hutan, sungai, tebing) sebagai penghalang sekaligus menciptakan akses yang sulit dijangkau. Untuk mendapatkan sistem teritori ini, maka pemilihan lokasi area pertahanan sangat penting, seperti di gunung, bukit, hutan, maupun tepian sungai (Schmorleitz, 1974: 35-36).

Dalam konteks mempertahankan teritori sebuah negara, pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dengan Mexico yang telah dicanangkan Donald Trump sejak masa kampanye menjadi contoh nyata. Keamanan perbatasan telah lama menjadi isu politik di Amerika Serikat, hal ini terkait imigran gelap, reformasi imigrasi, terorisme, dan perdagangan kontinental. Isu perbatasan menjadi perhatian sejak President Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan akan membangun tembok perbatasan sepanjang perbatasan wilayah Amerika Serikat dengan Mexico (Gravelle, 2018: 115). Kebijakan Trump dapat digambarkan sebagai sebuah mekanisme mempertahankan teritori dari ancaman imigran gelap Mexico yang masuk ke wilayah teritori Amerika Serikat. Ancaman atau potensi ancaman lain yang dianggap dapat membahayakan teritori adalah terorisme, dan perdagangan kontinental.

Sementara dalam lingkup wilayah permukiman, Oscar Newman mengembangkan konsep yang disebut sebagai *Defensible Space*. Konsep *Defensible Space* yang dikembangkan Newman sangat efektif karena biaya yang dibutuhkan rendah dan efektif. *Defensible Space* dikembangkan sebagai respon tingginya reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di permukiman mereka. Konsep ini bukan mendirikan sebuah pagar pembatas mengelilingi permukiman, tetapi mendefinisikan kembali fungsi suatu area fisik, area tanggung jawab, konsep ini menekankan bahwa area teritori suatu kawasan permukiman dapat dikontrol melalui desain dan layout permukiman serta partisipasi dan tanggung jawab masyarakat (Newman, 1996: 2-3). Konsep partisipatori masyarakat dalam mengamankan area permukiman telah lama dikenal di Indonesia, upaya bersama-sama yang dilakukan masyarakat baik di permukiman formal maupun informal di Indonesia disebut 'siskamling' yang merupakan singkatan dari "Sistem Keamanan Lingkungan" (Lestari et al., 2017; dan Asnawi et al., 2018: 4).

Berbeda dengan Newman, hasil penelitian Wortley & McFarlane (2011: 154) menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol atau *signage* teritorialitas juga efektif sebagai alat dalam mencegah terjadinya kejahatan atau upaya memasuki teritori suatu wilayah. Hal ini terkait faktor psikologis yang diakibatkan keberadaan simbol-simbol tersebut pada seseorang atau kelompok. Simbol-simbol ini akan menimbulkan ketidaknyamanan karena menyiratkan adanya ancaman bagi pihak yang melanggar, dan menunjukkan bahwa teritori wilayah tersebut dalam pengawasan.

Sistem Pertahanan Teritori

Berdasarkan berbagai kajian teori yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan terdapat berbagai sistem pertahanan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 1. Berbagai sistem pertahanan yang dapat digunakan untuk mempertahankan teritori wilayah yaitu:

1. Sistem pertahanan alami

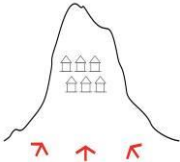
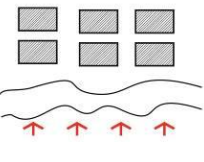
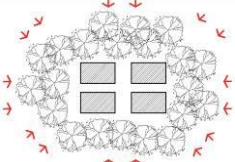
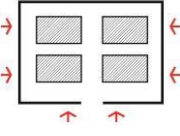
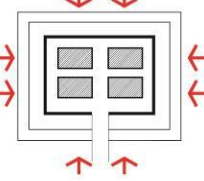
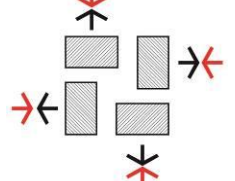
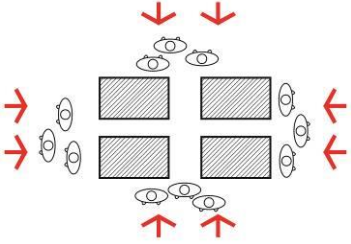
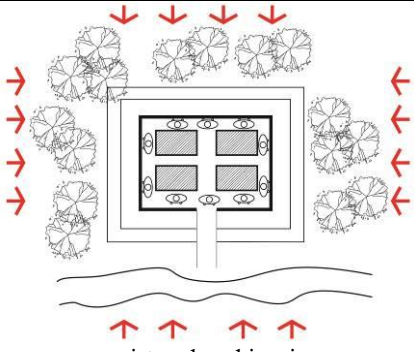
Sistem pertahanan ini menggunakan elemen alam dan kondisi geografis sebagai penghalang masuknya pihak musuh. Elemen-elemen alam yang dimanfaatkan sebagai sistem pertahanan adalah hutan, tebing, dan sungai. Untuk mendapatkan sistem pertahanan ini, maka pemilihan lokasi menjadi sangat penting, lokasi di gunung dan bukit menjadi lokasi paling aman karena sulit dijangkau serta memiliki berbagai sistem pertahanan alami seperti hutan, tebing, dan akses yang sulit dijangkau (Schmorleitz, 1974: 35-36).

2. Sistem pertahanan buatan (fisik)

Selain sistem pertahanan alami, sistem pertahanan juga dilakukan dengan elemen penghalan buatan seperti: parit (Schmorleitz, 1974: 1 & 35; dan Turnbull, 2008: 19-21)

yang dapat diisi dengan air maupun lumpur; benteng (Gravelle, 2018: 115), untuk membatasi akses ke dalam wilayah teritori dengan menggunakan tembok atau pagar yang sulit untuk dimasuki pihak luar; dan seting spasial (Newman, 1996: 2-3), dengan menata elemen bangunan saling mengawasi sehingga pihak lain tidak akan memasuki teritori wilayah karena secara visual akan terakses.

Tabel 1. Variasi Sistem Pertahanan Teritori Wilayah

Sistem pertahanan	Alternatif pendekatan		
Alami	 <p data-bbox="603 703 683 725">gunung</p>	 <p data-bbox="868 703 979 725">tepi sungai</p>	 <p data-bbox="1214 703 1289 725">Hutan</p>
Buatan (fisik)	 <p data-bbox="603 943 683 965">Benteng</p>	 <p data-bbox="900 943 963 965">parit</p>	 <p data-bbox="1182 943 1321 965">seting spasial</p>
Masyarakat	 <p data-bbox="815 1223 1114 1245">sistem keamanan lingkungan</p>		
Kombinasi	 <p data-bbox="879 1592 1059 1615">sistem kombinasi</p>		

Sumber: Diolah berdasarkan Hantono & Prमितasari (2018); Brower (1980); Newman (1996); Lestari et al. (2017); Asnawi et al. (2018); dan Wortley & McFarlane (2011).

3. Sistem pertahanan masyarakat

Sistem ini digunakan oleh Newman (1996: 2-3) dan dikenal dengan konsep *defensible space*, dan oleh masyarakat di Indonesia dengan istilah siskamling atau sistem keamanan lingkungan (Lestari et al., 2017; dan Asnawi et al., 2018: 4). Sistem pertahanan ini merupakan sistem pertahanan yang dibangun dengan melibatkan masyarakat secara partisipatori saling menjaga wilayah mereka dari pihak lain.

4. Sistem pertahanan kombinasi

Sistem ini menggabungkan berbagai sistem pertahanan seperti sistem pertahanan alami, baik menggunakan penghalang sungai, hutan atau lainnya yang dikombinasikan dengan sistem pertahanan buatan (parit, dan benteng) serta masyarakat sebagai sistem pertahanan yang *moveable*.

STUDI KASUS

Sistem Pertahanan Alami

Pemilihan lokasi sebagai area pertahanan banyak dilakukan dengan tujuan menghambat akses bagi musuh atau pihak lain yang bertujuan melakukan instruksi, salah satunya adalah kastil. Schmorleitz (1974: 1 & 35); dan Turnbull (2008: 19-21) mengatakan bahwa bahwa kastil dibangun oleh baron (tuan tanah) sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Lokasi ideal bagi sebuah kastil adalah di atas bukit karena memiliki akses visual ke seluruh penjuru. Selain itu, sungai dan danau juga merupakan lokasi yang baik, selain karena dapat menjadi penghalang alami, sumber air dari ke duanya juga dapat digunakan untuk mengisi parit pertahanan. Di Jepang, (Schmorleitz, 1974: 35-36) terdapat 3 tipe kastil berdasarkan topografi, ketiga tipe yang memanfaatkan kondisi alam sebagai sistem pertahanan ini adalah:

1. *San-jo* atau kastil gunung

Kastil yang terletak atau diletakkan terisolasi di puncak gunung merupakan lokasi strategis karena memiliki akses visual ke berbagai arah serta memiliki sistem pertahanan alami seperti jurang, medan berbatu, dan hutan yang berperan menghalangi musuh;

2. *Hira-jo* atau kastil dataran

Kastil ini memiliki sistem pertahanan yang lebih rentan dibanding kastil gunung serta tidak didukung oleh sistem pertahanan alami, namun memiliki keuntungan karena akses yang dekat ke kota;

3. *Hira-sanjo*, atau kombinasi

Merupakan kombinasi kastil gunung dan dataran yang terletak di bukit kecil atau di sisi gunung yang rendah dengan menara diletakkan di lokasi tertinggi sebagai pengawasan lingkungan sekitar. Kastil ini memiliki berbagai kelebihan yang dimiliki *San-jo* dan *Hira-jo*.

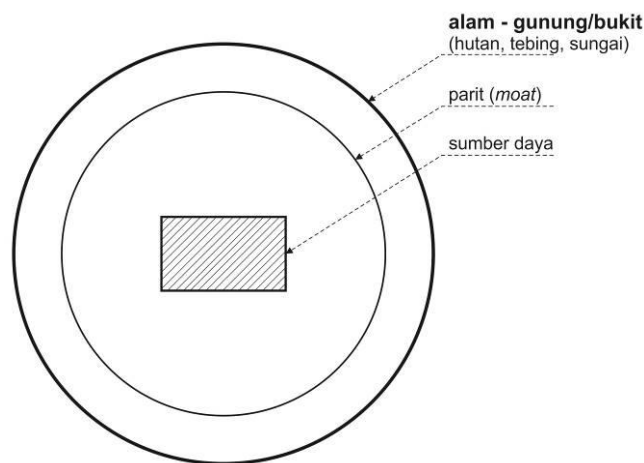
Tabel 2 mengilustrasikan bagaimana ke tiga tipe kastil yang menggunakan sistem pertahanan alami untuk mempertahankan teritori wilayah dari instruksi yang dilakukan musuh. Kastil merupakan sebuah wilayah teritori yang biasanya perletakkannya di gunung, dataran, tepian sungai, maupun lokasi topografi lainnya. Lokasi ini dipilih oleh tuan tanah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sekaligus perlindungan dari musuh. Pemilihan lokasi sangat terkait pada tingkat keamanan. Lokasi di gunung merupakan lokasi paling aman karena akses yang sulit dijangkau, dapat mengamati kondisi di seluruh penjuru, serta memiliki dukungan alam sebagai sistem pertahanan. Sedangkan area lain seperti dataran memiliki tingkat keamanan lebih rendah karena dapat diakses musuh dengan mudah, namun lokasi ini memiliki akses yang memudahkan pergerakan pemilik. Perletakan yang ketiga merupakan kombinasi keduanya, yaitu di dataran rendah atau bukit. Walau pun ketiga sistem pertahanan kastil Jepang mengutamakan alam sebagai sistem pertahanan utama, tetapi terdapat beberapa layer sistem pertahanan, lihat Gambar 6.

Tabel 2. Proses terciptanya teritori di Kastil Jepang

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Gambar Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area pegunungan	• Tempat tinggal (kastil); dan	• Keamanan dan perlindungan	• Musuh	• Alami (jurang, medan	

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Gambar Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> an 		<ul style="list-style-type: none"> berbatu, dan hutan). 	
Area dataran	<ul style="list-style-type: none"> Tempat tinggal (kastil); dan Akses mudah 	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> Musuh 	<ul style="list-style-type: none"> Alami (sungai atau rawa sebagai penghalang) Buatan (parit, benteng, dan menara) 	
Area perbukitan dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> Tempat tinggal (kastil); Lokasi tinggi; dan Akses mudah 	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> musuh 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinasi 	

Sumber: Diolah berdasarkan Schmorleitz (1974); dan Turnbull (2008).



Sumber: Diolah berdasarkan Schmorleitz (1974); dan Turnbull (2008).

Gambar 6. Layer Sistem Pertahanan Kastil

Studi kasus lain yang menggunakan sistem pertahanan alami sebagai sistem keamanan adalah permukiman suku Toraja di Sulawesi Selatan. Kebutuhan terhadap keamanan menjadi pertimbangan suku Toraja dalam memilih wilayah yang dikuasai. Perletakan permukiman di puncak bukit atau tebing merupakan keputusan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena pencapaian yang sulit (Kis-Jovak et al. (1988: 20-23). Menurut Tangdilintin & Syafei (1977:13) wilayah permukiman yang dikuasai suku Toraja disebut *Tondok Lempongan Bulan* atau *Tana Matarik Allo* yang berarti sebuah negeri yang memiliki integrasi antara kepercayaan dengan budaya sebagaimana bulan (*bulan*) and

matahari (*allo*). Beberapa *tondok* (perkampungan tradisional) di Toraja masih bertahan sampai saat ini (Manurung, 2017: 115), sebagaimana ditampilkan Gambar 7.

Tabel 3 merepresentasikan *tondok* (kampung/permukiman) sebagai sebuah wilayah yang dikuasai masyarakat dan dipertahankan dengan menggunakan sistem pertahanan alami di bukit atau tebing untuk menciptakan akses yang susah dijangkau musuh. Sementara Gambar 8 memperlihatkan layer sistem pertahanan yang digunakan.

Tabel 3. Teritori Di Permukiman Suku Toraja

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Gambar Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah; • Lumbung ; • Sawah; • Sumber air, dan • Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan; • Sosial; dan • Keamanan & perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Musuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Alami (tebing, hutan, dan sawah). 	

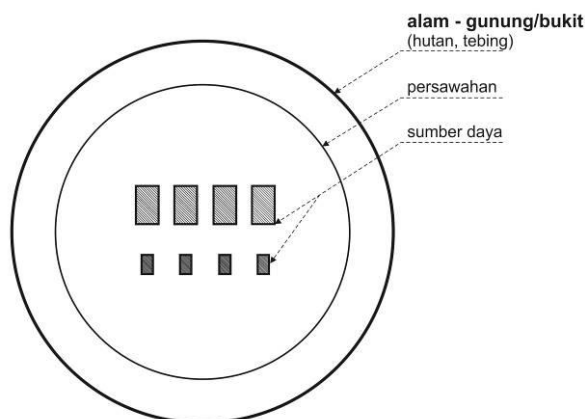
Sumber Gambar: Diolah berdasarkan Manurung (2017)

Sumber: Diolah berdasarkan Kis-Jovak et al. (1988); dan Tangdilintin & Syafei (1977).



Sumber: Manurung, 2017

Gambar 7. Perkampungan Ke'te Kesu Yang Berusia Ratusan Tahun



Sumber: Diolah berdasarkan Kis-Jovak et al. (1988); dan Tangdilintin & Syafei (1977).

Gambar 8. Layer Sistem Pertahanan Tondok

Sistem Pertahanan Buatan (Fisik)

Pendekatan sistem pertahanan buatan banyak digunakan pada berbagai wilayah, terutama penggunaan benteng atau tembok pembatas. Berikut beberapa studi kasus wilayah yang menggunakan benteng dan seting spasial pada sistem pertahannya (*defense system*).

1. Benteng

Permukiman tradisional Suku Batak Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah teritorial permukiman yang menggunakan sistem pertahanan buatan berupa tembok pembatas. Menurut Siahaan (2005: xiv & 192); Setiawan (2010: 148,152, & 153); dan Hanan (2012: 801), permukiman tradisional yang disebut dengan istilah *huta*, menggunakan tembok atau benteng yang disebut *topong ni huta*. Benteng terbuat dari batu setebal 1,5 meter setinggi 2-3 meter yang di atasnya ditanami pohon bambu untuk mengelilingi wilayah permukiman. *Huta* merupakan wilayah teritori yang terdiri dari beberapa rumah tradisional Batak, lumbung, ruang terbuka, serta elemen fisik lainnya. Sebagaimana proses terciptanya wilayah teritori pada

Tabel 4. Proses Terciptanya Teritori Di Huta

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Gambar Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area perbukitan dan lembah	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah; • Lumbung; • Sawah; • Sumber air, dan • Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan; • Sosial; dan • Keamanan & perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Musuh; dan • Binatang buas 	<ul style="list-style-type: none"> • Alami (pepohonan, dan persawahan) • Buatan (Benteng/ tembok batu) 	

(Sumber gambar: Hanan, 2012)

Sumber: Diolah berdasarkan Siahaan (2005); Setiawan (2010); dan Hanan (2012).

Gambar 6., menurut Setiawan (2010: 149-152); dan Hanan (2012: 801), pada awalnya *huta* merupakan area yang terletak di sekitar Danau Toba, baik yang berlokasi di

lembah maupun tebing. Area ini dikuasai untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, serta membangun interaksi sosial kemasyarakatan. *Huta* kemudian menjadi wilayah teritori yang dipertahankan dengan sistem pertahanan berupa tembok yang mengelilinginya untuk mencegah intrusi dari musuh maupun binatang buas, maupun kondisi alam. Selain tembok yang merupakan sistem pertahanan utama, terdapat juga sistem pertahanan yang menggunakan elemen tumbuhan seperti pepohonan dan persawahan sebagai sistem pertahanan terdepan (Gambar 10).

Gambar 9 menunjukkan kondisi spasial dan perspektif Huta Siallagan di Pulau Samosir. Pada Gambar 9a dan 9b terlihat gerbang masuk Huta Siallagan dengan tembok terbuat dari batu setinggi kurang lebih dua meter. Sementara Gambar 9c. memperlihatkan deretan rumah Batak yang merupakan wilayah teritori bagi pemilik maupun penghuninya, serta ruang terbuka yang merupakan ruang sosial masyarakat Huta.



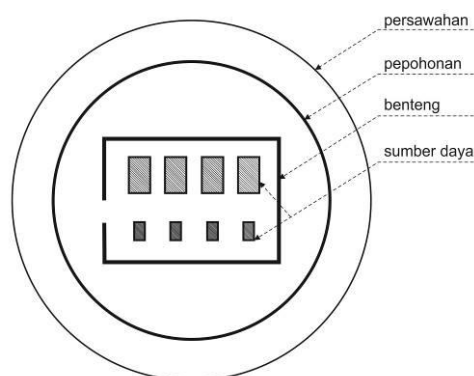
(a). Gerbang Huta

(b). Benteng

(c). Rumah Batak, ruang terbuka, dan benteng

Sumber: Dokumentasi penulis

Gambar 9. Sistem Pertahanan Huta Siallagan



Sumber: Diolah berdasarkan Siahana (2005); Setiawan (2010); dan Hanan (2012)


Gambar 10. Layer Sistem Pertahanan Huta

2. Seting spasial

Penataan elemen bangunan dapat digunakan sebagai sistem pertahanan untuk mencegah intrusi. Konsep ini dikenal sebagai *defensible space* dan dikembangkan oleh

Oscar Newman. Salah satu studi kasus yang menerapkan konsep *defensible space* adalah The Five Oaks Community in Dayton, Ohio. Menurut Newman (1996: 9-11), restrukturisasi layout dapat digunakan mengontrol kawasan permukiman, termasuk rumah, jalan, halaman, lobi, maupun koridor. Newman (1996: 31-43) mengungkapkan bahwa kawasan permukiman ini terletak di kawasan urban, dan sebelum dilakukan redesain, tingkat kejahatan dengan kekerasan mengalami peningkatan 77%, pencurian 76%, dan vandalisme 38%. Masyarakat miskin ingin memiliki hunian di lokasi ini karena kebutuhan akan tempat tinggal yang murah, sewa, dan kebutuhan akan rasa aman. Oleh sebab itu, redesain wilayah permukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penataan atau layout bangunan dilakukan menggunakan sistem *cul-de-sacs*, dengan orientasi bangunan saling mengawasi, sementara *cul-de-sacs* dapat difungsikan sebagai area bermain anak maupun area interaksi sosial masyarakat. Tabel 5 memperlihatkan proses terciptanya area teritori permukiman di *The Five Oaks Community* dan pendekatan yang digunakan sebagai sistem pertahanan.

Tabel 5. Proses Terciptanya Teritori Di The Five Oaks Community

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah; dan • Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan; • Sosial; dan • Keamanan & perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kriminalitas; dan • Vandalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buatan (Seting spasia; <i>Cul-de-sacs</i>) 	

Sumber Gambar: Newman (1996).

Sumber: Diolah berdasarkan Newman (1996).

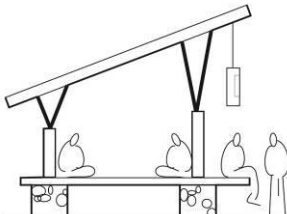
Satu tahun setelah dilakukan redesain pada kawasan permukiman ini, terjadi penurunan tingkat kejahatan yang signifikan. Secara keseluruhan tingkat kejahatan menurun 26%, sedangkan tingkat kriminalitas dengan kekerasan menurun 50% Newman (1996: 55). Berdasarkan data statistik penurunan tingkat kejahatan dapat disimpulkan konsep *defensible space* yang diterapkan telah berhasil melindungi warga permukiman. Ini menunjukkan sistem seting spasial merupakan salah satu alternatif sistem pertahanan yang dapat digunakan.

Sistem Pertahanan Masyarakat

Pendekatan yang menggunakan peran partisipasi masyarakat sebagai sistem pertahanan salah satunya dikembangkan kelompok masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat desa atau kampung. Konsep sistem pertahanan partisipatori ini disebut ‘siskamling’. Program ini merupakan kegiatan swakarsa yang dilakukan masyarakat secara bersama menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, khususnya untuk dalam memenuhi kebutuhan keamanan (Lestari et al., 2017; Asnawi et al., 2018: 4; dan Aditama, et al., 2013). Kegiatan ini menurut Lestari et al., (2017) membutuhkan peran kepala kampung sebagai koordinator sekaligus fasilitator dan motivator dalam menggerakkan kepala dusun dan seluruh warga, sejak mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan merupakan sebuah aktivitas pencegahan atau penanggulangan ancaman yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dan dipimpin oleh kepala kampung atau pemimpin pada lingkungan

permukiman tersebut. Tabel 6 menunjukkan proses sebuah kawasan permukiman baik kampung maupun desa dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hunian dan rasa aman, dan kemudian wilayah permukiman ini dipertahankan dari ancaman pencurian secara swakarsa oleh masyarakat dengan pendekatan masyarakat.

Tabel 6. Pertahanan Teritori Dengan Pendekatan Masyarakat

Area	Wilayah yang dimiliki		Wilayah yang dipertahankan		Gambar Sistem Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area perkampungan / pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> Rumah; dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pangan; Sosial; dan Keamanan & perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pencuri 	<ul style="list-style-type: none"> Pertahanan masyarakat (Sistem keamanan lingkungan berbasis partisipatori masyarakat) 	

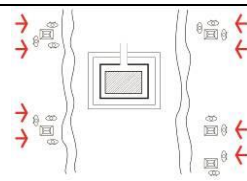
Sumber: Penulis

Sumber: Diolah berdasarkan Lestari et al. (2017); dan Asnawi et al. (2018).

Sistem Pertahanan Kombinasi

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tahun 1755 membawa kesepakatan pembagian kerajaan, sebagian dikuasai Sri Susuhunan Paku Buwono III dan berlokasi di Surakarta, sebagian lainnya menjadi kekuasaan Sri Susuhunan Kabanaran atau Sultan Hamengkubowono. (Sabdacaratakama, 2008: 16; dan Setyowati et al., 2017: 15-16, Nugraha, 2014: 215). Lebih lanjut dipaparkan Sabdacaratakama bahwa wilayah yang dikuasai Sultan Hamengkubuwono dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibukota bernama Ngayogyakarta. Untuk melindungi wilayah Keraton sebagai sumber daya, dibangun sistem pertahanan berupa benteng setinggi tiga setengah meter dan lebar mencapai tiga sampai empat meter, pelengkung, serta parit sedalam tiga meter dengan lebar empat meter. Sistem pertahanan buatan yang mengelilingi wilayah keraton tersebut berada di sisi dalam kedua sungai yang merupakan sistem pertahanan alami yaitu, sungai Winongo dan sungai Code (Sabdacaratakama, 2008: 103; dan Nugraha, 2014: 215).

Tabel 7. Pertahanan teritori dengan pendekatan kombinasi

Area	Wilayah yang Dimiliki		Wilayah yang Dipertahankan		Gambar Wilayah Pertahanan
	Sumber daya	Kebutuhan	Dipertahankan dari	Mekanisme	
Area keraton dan wilayah kerajaan	<ul style="list-style-type: none"> Keraton; Warga; Aset kerajaan; dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pangan; Sosial; dan Keamanan & perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> Musuh (Belanda, kerajaan lain dan pemberontak) 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinasi (Alami - sungai; buatan - benteng, parit; dan masyarakat - pathok negoro) 	

Sumber: Diolah berdasarkan Setyowati et al. (2017)

Sumber: Diolah berdasarkan Sabdacaratakama (2008); Nugraha (2014); Setyowati et al. (2017); Hadi & Roychansyah (2018); dan Setyowati et al. (2018).

Selain memanfaatkan sungai sebagai sistem pertahanan alami dan benteng yang merupakan sistem pertahanan buatan, menurut Setyowati et al. (2017: 15-17); Hadi & Roychansyah (2018: 150-151); dan Setyowati, et al. (2018: 2) pada tahun 1700-1800 juga dibangun sistem pertahanan masyarakat dalam wujud berupa masjid dan dikenal dengan

pertahanan alami dengan memilih perletakan di antara dua sungai; sistem pertahanan buatan yang dibangun dengan benteng mengelilingi keraton; serta sistem pertahanan, dengan menggunakan komunitas/ masyarakat yang tinggal di sekitar masjid. Keberadaan ketiga sistem pertahanan tersebut menunjukkan sistem pertahanan berlapis untuk melindungi keraton sebagai sumber daya (Gambar 12).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa, suatu area menjadi sebuah wilayah teritori memiliki suatu proses serta mekanisme yang cukup panjang. Kata ‘teritorialitas’ yang awalnya merupakan terminologi untuk menggambarkan wilayah kekuasaan hewan (Brower (1980: 179-180; Grahame (2001: 275); dan Osborne (1992: 13), telah berkembang menjadi terminologi yang memiliki definisi sebagai wilayah yang dikuasai dan dipertahankan manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Sebelum menjadi teritori, sebuah wilayah terlebih dahulu dikuasai karena memiliki sumber daya yang diyakini mampu memenuhi kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Wilayah teritori dapat terbentuk dengan berbagai skala berbeda, baik dalam konteks permukiman, kawasan, bahkan wilayah teritori sebuah kota maupun negara. Wilayah yang dikuasai kemudian berupaya untuk dipertahankan untuk melindungi sumber daya yang dimiliki.

Dalam mempertahankan wilayah teritori, digunakan salah satu atau beberapa sistem pertahanan yaitu: sistem pertahanan alami; sistem pertahanan buatan; sistem pertahanan berbasis masyarakat; serta sistem pertahanan kombinasi. Beberapa wilayah teritori menerapkan sistem pertahanan berlapis, dengan menggunakan benteng sebagai pertahanan paling inti, sedangkan pada lapisan terluar pada umumnya menggunakan elemen alam atau komunitas sebagai sistem pertahanannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kedua penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Doktor Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada atas segala dukungan dalam proses penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Hasyim, A., & Adha, M. M. 2013. Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Siskamling. *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 1 (6).
- Aguilar, A. G. 2008. Peri-urbanization, illegal settlements and environmental impact in Mexico city. *Cities*, 25(3), 133–145. DOI.org/10.1016/j.cities.2008.02.003
- Aiello, J. & Thompson, D. E. 1980. Personal Space, Crowding, and Spatial Behavior in a Cultural Context. Dalam I. Altman, A. Rapoport, dan J. F. Wohwill (Eds.) *Human Behavior and Environment: Advance in Theory and Research. Volume 4 Environment and Culture*. (107-178). New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- Asnawi, R., Andrisman, T., dan Husin, B. R. 2018. Upaya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor: Studi di Wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ponale*, Vol 6 (3), 1-15.
- Brower, S. N. 1980. Territory in Urban Setting. Dalam I. Altman, A. Rapoport, dan J. F. Wohwill (Eds.) *Human Behavior and Environment: Advance in Theory and Research. Volume 4 Environment and Culture*. (179-207). New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- Ching, F. D. K. 2007. *Architecture: Form, Space, and Order. Fourth Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Grahame, H. 2001. *A Level Psychology Through Diagrams (Oxford Revision Guides*. New York: Oxford University Press.
- Gravelle, T. B. 2018. Politics, Time, Space, and Attitude Towards US-Mexico Border Security. *Political Geography*, Vol. 65 (2018), 107-116.

- Hadi, A. H., & Roychansyah, M. S. 2018. Menggali Identitas Kawasan Masjid Pathok Negero Plosokuning Berdasarkan Pendekatan “*Collective Memory*”. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, Vol. 1 (2), 149-167.
- Hanan, H. 2012. Modernization and Cultural Transformation: The Expansion of Traditional Batak Toba House in Huta Siallagan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 50 (2012), 800 – 811
- Hantono, D., dan Pramitasari, D. 2018. Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik. *Nature (National Academic Journal of Architecture)*, Vol 5 (2), 85-93.
- Hutchison, E.D. 2008. The Physical Environment. Dalam E. D Hutchison (Ed.). *Dimensions of Human Behavior: Person and Environment. Third Edition (227-260)*. Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Hutt, S., Blanco, C. M., Stern, W. E., dan Harris, S. N. 2004. *Cultural Property Law: A practitioner's guide to management, protection, and preservation of heritage resources*. USA: American Car Association.
- Jurmain, R., Kilgore, L., dan Trevathan. W. 2006. *Essentials of Physical Anthropology. Sixth Edition*. Belmont: Thomson Learning, Inc.
- Kis-Jovak, J.I., Nooy-Palm, H., Schefold, R., dan Schulz-Dornburg, U. 1988. *Banua Toraja: Changing pattern in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja, Sulawesi, Indonesia*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Krippendorff, K. 2004. *Content Analysis: An introduction to its methodology. Second Edition*. California: Sage Publications, Inc.
- Lestari, A. T., Suntoro, I., dan Nurmalisa, Y. 2017. Peranan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Siskamling. *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 5 (1).
- Manurung. P. 2017. Daylighting and architectural concept of traditional architecture: The Tongkonan in Toraja, Indonesia. *ITU A|Z*, Vol. 14 (1), 111-126.
- Maslow, A. H. 2016. *A Theory of Human Motivation*. Widwest Journal Press.
- Meis, P. V. 2004. *Elements of Architecture: From form to place*. New York: Spon Press.
- Newman, O. 1996. *Creating Defensible Space*. U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research.
- Nugraha, D. H. 2014. *Transformasi Fungsi Arsitektur Pertahanan Keraton dalam Konteks Masa Lalu dan Masa Kini*. Dalam “Insting Teritorial dan Ruang Pertahanan”, Surabaya.
- Oliver, P. 2006. *Built to Meet Needs: Cultural Issues in vernacular architecture*. Oxford: Elsevier, Ltd.
- Osborne, J. 1992. *The Cardinal*. Austin: University of Texas Press
- Oxford Learner Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>. Diakses pada tanggal 19 September dan 3 Oktober 2019.
- Putri, R., Pangarsa, G. W., Ernawati, J. 2012. Pendekatan Teritori pada Fleksibilitas Ruang dalam Tradisi Sinoman dan Biyada di Dusun Karang Ampel Malang. *Dimensi (Journal of Architecture and Built Environment)*, Vol 39 (2), 65-76.
- Sabdacarakatama, K. 2008. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Sack, R. D. 1986. *Human Territoriality: Its Theory and History*. Cambridge: Cambridge University Press
- Said, R., Alfiah. 2017. Teritorialitas pada Ruang Publik dan Semi Publik Rumah Susun. *Nature (National Academic Journal of Architecture)*, Vol 4 (2), 128-137.
- Schmorleitz, M. S. 1974. *Castle in Japan*. Tokyo: Charles E. Turtle Co, Inc.
- Schreier, M. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*. London: Sage Publications, Ltd.
- Setiawan, T. 2010. Bentuk Adaptasi Lingkungan pada Permukiman Tradisional di Danau Toba. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, Vol. 13 (25), 145-153.
- Setyowati, E., Hardiman, G., Murtini, T. W., & Surya, V. R. V. 2017. *Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa: Dalam arsitektur masjid pathok negoro*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Setyowati, E., Hardiman, G., & Murtini, T. W. 2018. Pathok Negero Mosque as the Form of Territorial Defense Region of Mataram Kingdom of Islam Java in Jogjakarta. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 106 (2018) 012074. DOI:10.1088/1755-1315/106/012074.
- Siahaan, B. 2005. *Batak Toba: Kehidupan dibalik tembok bambu*. Jakarta: Kempala Foundation.
- Stamps, J. 2011. *Territoriality*. Dalam G. Greenberg dan M. M. Haraway (Eds). *Comparative Psychology: A Handbook (761-770)*. New York: Routledge.
- Steverink, N. 2014. Successful Development and Ageing: Theory and intervention. Dalam N. A. Pachana., & K. Laidlaw (Eds.). *Oxford Library of Psychology: The Oxford handbook of clinical geropsychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Strang, V., and Busse, M. 2011. *Ownership and Appropriation*. Oxford: Berg Publishers.

- Tangdilintin, L.T. & Syafei, M. 1977. *Toraja: An introduction to a unique culture*. Tana Toraja: Lepongan Bulan Foundation.
- Tisdell, C. A. 2005. *Environmental Conservation, Second Edition*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Turnbull, S. 2008. *Japanese Castles AD 250-1540*. Oxford: Osprey Publishing.
- Vaccaro, I., Dawson, A. C., Zanotti, L. 2014. *Negotiating Territoriality: Spatial Dialogues between State and Tradition*. New York: Routledge.
- Wortley, R., & McFarlane, M. 2011. The Role of Territoriality in Crime Prevention: A field experiment. *Security Journal*, Vol. 24 (2), 149–156. DOI.org/10.1057/sj.2009.22.
- Yeganeh, M., Kamalizadeh, M. 2018. Territorial Behaviors and Integration Between Buildings and City in Urban Public Spaces of Iran's Metropolises. *Frontiers of Architecture Research*, Vol. 2018 (7), 588-599.